BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 199, pasal 200 dan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan dana tahun anggaran berjalan maka perlu menetapkan besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2011.

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Dipindai dengan CamScanner

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2011;

12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat (SKPK) adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

7. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPK.

9. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Dipindai dengan CamScanner

12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

14. SPP Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambah uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumen disiapkan oleh PPTK.

16. Surat perintah pembayaran yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang di gunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.

17. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

18. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPK yang selanjutnya di singkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

PASAL 2

(1) Penanggung jawab pengelolaan belanja daerah SKPK adalah kepala SKPK selaku penguna anggaran/pengguna barang SKPK.

(2) Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah SKPK yang dipimpinnya.

BAB III
BATAS JUMLA H PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

PASAL 3

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah di keluarkannya Peraturan Bupati ini. SPP-UP di pergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPK. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu

(2) Jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) adalah Pagu Anggaran per Tahun (PAT) tidak termasuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Modal (BM) dengan formulasi sebagai berikut:

(PUP= PAT – BTL – BM)

Dipindai dengan CamScanner

KETERANGAN :
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
PAT = Pagu Anggaran per Tahun
BM = Belanja Modal
BTL = Belanja Tidak Langsung

(3) Tarif Uang Persediaan (TUP) ditentukan berdasarkan hasil pengurangan Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dibagikan 12 bulan apabila pengesahan APBK disetujui pada awal Januari tahun berkenaan. Apabila APBK disahkan pada bulan Maret tahun berkenaan maka faktor pembaginya adalah 10 bulan sesuai dengan jumlah mulai bulan APBK dilaksanakan.

(4) Jumlah Uang Persediaan (UP) tidak berlaku untuk :
a. Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan.
b. Belanja Langsung untuk Belanja Modal diatas Rp. 5.000.000,-

(5) Jumlah Uang Persediaan (UP) maksimal untuk pengajuan SPP-UP dihitung dengan membagikan jumlah Perhitungan Uang Persediaan (PUP) dengan Tarif Uang Persediaan (TUP) atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$UP = PUP \div TUP$$

KETERANGAN :
UP = Uang Persediaan
PUP = Perhitungan Uang Persediaan
TUP = Tarif Uang Persediaan

(6) Batas maksimal jumlah dana untuk pengajuan SPP-GU setelah dipertanggungjawabkan (diSPJkan) minimal 60% dari jumlah SPP-UP.

(7) Belanja PPKD atau Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga dilakukan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS).

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

PASAL 4

(1) SPP-UP dan SPP-GU diajukan setelah ditetapkan APBK.

(2) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

(3) SPP-UP dan SPP-GU diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK.

PASAL 5

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).

(2) Dokumen SPP-UP meliputi:
a. Surat Pengantar SPP-UP
b. Ringkasan SPP-UP

Dipindai dengan CamScanner

c. Rincian SPP-UP
d. Salinan SPD, dan
e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD.

PASAL 6

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU meliputi:
a. Surat Pengantar SPP-GU
b. Ringkasan SPP-GU
c. Rincian SPP-GU
d. Salinan SPD
e. Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas pengunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya, salinan SPD, dan
f. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD.

PASAL 7

(1) PPK-SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas pengajuan dokumen SPP-UP dan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran.

(2) PPK-SKPK dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, mempunyai tugas:
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
c. Melakukan Verifikasi SPP
d. Menyiapkan SPM
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
f. Melaksanakan Akuntansi, dan
g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPK.

PASAL 8

Setelah PPK-SKPK meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPP-UP dan SPP-GU, PPK-SKPK menyiapkan dan mengajukan kepada kepala SKPK selaku pengguna anggaran untuk ditertibkan SPM-UP dan SPM-GU.

PASAL 9

SPM-UP dan SPM-GU yang telah ditertibkan diajukan ke PPKD (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selaku BUD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

PASAL 10

Uraian lebih lanjut tentang besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2011, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
Pada tanggal : 17 Maret 2011 M
12 Jumadil Akhir 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 18 Maret 2011 M
13 Jumadil Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI, TS.

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR: 02

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 MARET 2011
TENTANG : PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2011.....

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 10 bulan	8	9
1	DINAS PENDIDIKAN	131,858,160,282	97,967,646,482	12,828,830,000	21,061,683,800	10	2,106,168,000	
2	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)	1,727,610,574	1,513,189,574		214,421,000	10	21,442,000	
3	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)	2,592,053,490	2,319,272,990	-	272,780,500	10	27,278,000	
4	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)	1,597,771,366	1,396,763,366	-	201,008,000	10	20,100,000	
5	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)	1,656,177,014	1,478,579,014	-	177,598,000	10	17,759,000	
6	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA)	1,870,726,067	1,662,926,567	-	207,799,500	10	20,779,000	
7	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)	1,797,110,090	1,579,319,590	-	217,790,500	10	21,779,000	
8	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)	943,070,812	818,875,812	5,000,000	119,195,000	10	11,919,000	
9	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	2,085,990,131	1,826,517,631	-	259,472,500	10	25,947,000	
10	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1,486,809,739	1,264,345,239	-	222,464,500	10	22,246,000	
11	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)	1,701,893,255	1,524,367,755	-	177,525,500	10	17,752,000	
12	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)	1,005,430,164	807,890,164	-	197,540,000	10	19,754,000	
13	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)	731,908,597	555,766,097	-	176,142,500	10	17,614,000	
14	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)	2,375,532,221	2,147,504,221	5,000,000	223,028,000	10	22,302,000	
15	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)	2,363,336,449	2,181,048,949	-	182,287,500	10	18,228,000	
16	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)	1,753,142,659	1,614,094,159	-	139,048,500	10	13,904,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 10 bulan	8	9
17	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)	1,681,112,085	1,497,935,085	-	183,177,000	10	18,317,000	
18	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)	1,534,848,512	1,319,195,012	-	215,653,500	10	21,565,000	
19	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)	1,846,358,878	1,597,318,878	-	249,040,000	10	24,904,000	
20	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)	1,975,979,815	1,710,865,815	-	265,114,000	10	26,511,000	
21	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)	1,156,314,946	978,496,946	-	177,818,000	10	17,781,000	
22	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)	725,674,496	569,711,996	-	155,962,500	10	15,596,000	
23	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)	823,987,137	633,253,137	5,000,000	185,734,000	10	18,573,000	
24	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)	1,309,223,655	1,119,501,155	-	189,722,500	10	18,972,000	
25	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)	850,930,538	707,496,038	5,000,000	138,434,500	10	13,843,000	
26	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)	729,394,644	596,625,144	-	132,769,500	10	13,276,000	
27	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)	1,936,992,147	1,652,923,647	-	284,068,500	10	28,406,000	
28	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)	1,362,329,001	1,163,530,001	-	198,799,000	10	19,879,000	
29	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	797,658,546	601,541,546	-	196,117,000	10	19,611,000	
30	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)	898,823,595	773,203,595	-	125,620,000	10	12,562,000	
31	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)	807,085,031	630,739,531	-	176,345,500	10	17,634,000	
32	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)	910,174,256	738,520,756	-	171,653,500	10	17,165,000	
33	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)	448,266,343	292,607,343	-	155,659,000	10	15,565,000	
34	Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)	1,491,283,423	1,051,138,923	78,650,000	361,494,500	10	36,149,000	
35	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)	293,775,898	165,398,238	-	128,377,660	10	12,837,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 10 bulan	8	9
36	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)	301,127,409	175,308,009	-	125,819,400	10	12,581,000	
37	Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)	423,879,086	256,357,726	-	167,521,360	10	16,752,000	
38	Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)	883,330,833	651,539,213	-	231,791,620	10	23,179,000	
39	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)	356,603,211	238,807,211	-	117,796,000	10	11,779,000	
40	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)	483,221,109	377,828,609	-	105,392,500	10	10,539,000	
41	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)	653,352,809	526,574,809	-	126,778,000	10	12,677,000	
42	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)	468,694,447	274,236,447	-	194,458,000	10	19,445,000	
43	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)	368,977,531	255,029,531	-	113,948,000	10	11,394,000	
44	Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)	423,249,989	299,590,489	-	123,659,500	10	12,365,000	
45	Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)	703,357,924	545,137,424	-	158,220,500	10	15,822,000	
46	DINAS KESEHATAN	8,640,442,213	3,092,354,413	2,523,452,800	3,024,635,000	10	302,463,000	
47	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA	14,342,292,020	5,289,205,020	2,175,630,000	6,877,457,000	10	687,745,000	
48	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)	2,016,843,779	1,594,480,779	-	422,363,000	10	42,236,000	
49	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)	2,090,861,036	1,698,779,036	-	392,082,000	10	39,208,000	
50	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM)	3,340,409,172	2,762,517,672	-	577,891,500	10	57,789,000	
51	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)	1,487,564,433	1,196,928,183	-	290,636,250	10	29,063,000	
52	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)	2,100,963,215	1,807,473,715	-	293,489,500	10	29,348,000	
53	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)	1,884,393,719	1,655,357,719	-	229,036,000	10	22,903,000	
54	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)	1,165,356,141	948,773,141	-	216,583,000	10	21,658,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 10 bulan	8	9
55	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)	1,614,747,347	1,319,141,847	-	295,605,500	10	29,560,000	
56	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)	1,524,934,751	1,144,540,751	-	380,394,000	10	38,039,000	
57	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)	2,039,958,487	1,674,055,487	-	365,903,000	10	36,590,000	
58	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)	829,196,609	627,060,109	-	202,136,500	10	20,213,000	
59	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)	954,253,472	720,946,972	-	233,306,500	10	23,330,000	
60	Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)	521,265,666	367,199,166	-	154,066,500	10	15,406,000	
61	DINAS BINA MARGA	20,342,961,578	1,994,089,978	16,427,811,600	1,921,060,000	10	192,106,000	
62	DINAS PENGAIRAN	10,685,617,406	1,802,286,006	7,800,240,000	1,083,091,400	10	108,309,000	
63	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	12,784,077,244	1,562,666,594	10,417,634,400	803,776,250	10	80,377,000	
64	BAPPEDA	6,149,502,101	2,322,096,701	63,980,000	3,763,425,400	10	376,342,000	
65	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	3,301,287,430	1,778,672,930	382,700,000	1,139,914,500	10	113,991,000	
66	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	4,500,336,360	1,209,420,360	728,770,000	2,562,146,000	10	256,214,000	
67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,936,397,706	895,566,206	168,400,000	1,872,431,500	10	187,243,000	
68	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2,536,971,199	1,287,727,699	230,800,000	1,018,443,500	10	101,844,000	
69	DINAS SYARIAT ISLAM	7,004,453,571	1,731,012,071	723,000,000	4,550,441,500	10	455,044,000	
70	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	821,661,000	199,200,000	92,500,000	529,961,000	10	52,996,000	
71	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN	3,777,811,817	1,773,097,917	1,130,118,400	874,595,500	10	87,459,000	
72	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PENGELOLAAN USAHA DAERAH	1,900,053,756	1,112,220,756	20,500,000	767,333,000	10	76,733,000	
73	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4,334,851,550	1,474,542,310	909,817,740	1,950,491,500	10	195,049,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 10 bulan	8	9
74	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	2,913,279,286	794,908,286	24,200,000	2,094,171,000	10	209,417,000	
75	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,089,476,314	712,995,814	8,900,000	1,367,580,500	10	136,758,000	
76	DPRK NAGAN RAYA	4,658,786,000	4,658,786,000	-	-	10	-	LS
77	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	510,794,499	510,794,499	-	-	10	-	LS
78	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	33,304,114,129	10,230,797,654	5,282,090,000	17,791,226,475	10	1,779,122,000	
79	SEKRETARIAT DPRK	13,346,521,176	2,542,170,076	1,111,710,000	9,692,641,100	10	969,264,000	
80	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :							
	- BELANJA SKPK	15,384,510,023	4,371,183,073	2,478,600,000	8,534,726,950	10	853,472,000	
	- BELANJA PPKD	46,741,785,135	46,741,785,135	-	-	10	-	LS
81	INSPEKTORAT	3,091,535,544	1,762,113,295	111,765,000	1,217,657,249	10	121,765,000	
82	KECAMATAN BEUTONG	3,515,439,255	1,694,774,405	-	1,820,664,850	10	182,006,000	
83	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	3,576,011,637	1,655,365,937	-	1,920,645,700	10	192,064,000	
84	KECAMATAN SEUNAGAN	3,758,640,655	1,706,467,505	-	2,052,173,150	10	205,217,000	
85	KECAMATAN KUALA	2,897,177,649	1,513,807,949	-	1,383,369,700	10	138,336,000	
86	KECAMATAN DARUL MAKMUR	4,950,611,241	1,804,407,441	24,000,000	3,122,203,800	10	312,220,000	
87	KECAMATAN SUKA MAKMUE	2,670,400,085	1,241,610,685	-	1,428,789,400	10	142,878,000	
88	KECAMATAN KUALA PESISIR	2,344,387,445	829,216,745	153,800,000	1,361,370,700	10	136,137,000	
89	KECAMATAN TADU RAYA	2,624,258,236	945,432,536	5,000,000	1,673,825,700	10	167,382,000	
90	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1,310,391,207	582,911,747	126,200,000	601,279,460	10	60,127,000	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA SKPK	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	TARIF UANG PERSEDIAAN	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 - 5	7 = 10 bulan	8	9
91	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	5,547,555,787	2,747,563,587	912,760,000	1,887,232,200	10	188,723,000	
92	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	4,578,226,702	2,008,047,202	999,635,000	1,570,544,500	10	157,054,000	
93	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP	1,418,946,839	781,862,579	127,670,000	509,414,260	10	50,941,000	
94	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	9,062,929,335	2,520,617,335	3,209,672,000	3,332,640,000	10	333,264,000	
95	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	7,107,748,910	3,364,113,370	1,218,830,000	2,524,805,540	10	252,480,000	
96	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	4,647,093,067	1,334,809,567	2,152,500,000	1,159,783,500	10	115,978,000	
97	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,694,006,948	1,567,186,448	2,096,060,000	2,030,760,500	10	203,076,000	
	JUMLAH	**497,566,822,086**	**285,723,662,272**	76,766,226,940	135,076,932,874		13,507,589,000	

SUKA MAKMUE, 14 MARET 2011

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner